

PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

DIAH SITA RUKMI

NIM. 130 212 0246

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2017 M / 1439 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI
KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM

NAMA : DIAH SITA RUKMI

NIM : 130 212 0246

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (1)

Palangka Raya November 2017

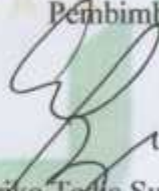
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



Entiko Teda Sukmana, M.SI
NIP. 197506202001121003

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dra. Hj. Rahmانيar, M.SI
NIP. 195406301981032001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Itsia Yunisva Aviva, M.E.Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Diah Sita Rukmi

Palangka Raya, November 2017

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : DIAH SITA RUKMI

Nim : 130 212 0246

Judul : EFEKTIVITAS PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
KELURAHAN DANAU TUNDAI OLEH PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



Enriko Tedja Sukmana, M.SI
NIP. 197506202001121003

LEMBAR PENGESAHAN

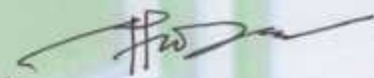
Skripsi yang berjudul **PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM** oleh Diah Sita Rukmi dengan NIM : 130 212 0246 telah dimunagasyahkan Tim Munagasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 November 2017

Palangka Raya, November 2017

1. Ali Sadikin, M.SI
Ketua Sidang/Anggota
2. Jelita, M.SI
Penguji Utama/Anggota
3. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji II/Anggota
4. Enriko Tedja Sukmana, M.SI
Sekretaris/Anggota



(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dra. Hj. Rahmانيar, M.SI
NIP. 195406301981032001

PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

ABSTRAK

Oleh : Diah Sita Rukmi

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Peran dan upaya pemerintah dalam menangani fakir miskin sangat dibutuhkan guna meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini berfokus kepada Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana upaya dan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai? Dan selanjutnya, Bagaimana upaya dan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai dalam tinjauan ekonomi Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Subjek dari penelitian ini ialah Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Kasi Kesos Kecamatan Sebangau, Lurah Danau Tundai, dan warga Kelurahan Danau Tundai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya dan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai diantaranya adalah melalui program Kota-Ku/BKM, Raskin/Rastra, dan BLT/PKH. 3) Program Kota-Ku/ BKM yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan perspektif ekonomi Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (*maslahah*). Sedangkan pendistribusian Raskin/Rastra di Kelurahan Danau Tundai adalah tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dengan Prinsip Keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin/Rastra tersebut tidak mencerminkan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan. Prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam itu harusnya disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat walau hanya memberikan bantuan Raskin dan bantuan konsumtif lainnya. Strategi ekonomi Islam yang tepat guna mengentaskan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan, zakat produktif, dan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Kata Kunci : Penanganan, Kemiskinan, dan Ekonomi Islam

THE ROLE AND THE GOVERNMENT'S EFFECT IN POVERTY HANDLING IN THE DANAU TUNDAI VILLAGE IN ISLAMIC ECONOMIC REVIEW

ABSTRACT

By : Diah Sita Rukmi

Poverty is a classical social phenomenon already inherent in society. The size and understanding is relative to the socio-economic conditions of the community. The role and efforts of the government in dealing with the poor are urgently needed to improve the living standards and welfare of the poor. This study focuses on the Handling of Poor People in Danau Tundai Village by the Government of Palangka Raya City in the Overview of Islamic Economics. As for the formulation of the problem in this research is: How to handle poverty in Danau Tundai village by the Government? And furthermore, How is poverty handling in Danau Tundai village by the Government in a review of Islamic Economics?

This research is a field research, so the method used is descriptive qualitative approach. Data collection methods used are by direct observation, interviews, and collect important documents. The subject of this research is Section Chief Stimulant Assistance and Environmental Arrangement of Poor Handling Sector of Social Service and Labor of Palangka Raya City, Head of Social Welfare Sub-District of Sebangau, Headman of Danau Tundai and Danau Tundai Village residents.

The results showed that: 1) Efforts and role of government in handling poverty in Danau Tundai Village among others is through program of Kota-Ku / BKM, Raskin / Rastra, and BLT / PKH. 3) The Kota-Ku / BKM Program issued by the government is in accordance with its aim to achieve the welfare of society that is in line with the economic perspective of Islam as a blessing for all mankind (maslahah). While the distribution of Raskin / Rastra in Danau Tundai Village is not in accordance with the concept of distribution in the Islamic Economic Perspective. With the Principle of Justice in distribution, the distribution of Raskin / Rastra does not reflect the proper rights and should take precedence over the needy. The principle of distribution in Islamic Economics should be channeled to the more needy. the government's policy of reducing economic disparities in underprivileged communities is not appropriate even if it only provides Raskin assistance and other consumptive assistance. The right Islamic economic strategy to alleviate poverty is through empowerment, productive zakat, and government policy in accordance with the principles of Islamic Economics.

Keywords: Handling, Poverty, and Islamic Economics

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi dan sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Berakhirnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Atas selesainya studi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana, maka penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH, Selaku Rektor IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

3. Yang terhormat, Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI selaku pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati pada beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yang terhormat staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran administrasi akademik saya,
5. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tersayang Rusdianto dan Ibunda tercinta Noor Sartolah, yang telah memberikan jutaan malaikat dengan kasih sayang dan do'a beliau kepada penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menuju kesuksesan pada kehidupan dunia dan akhirat serta telah memberikan dukungan bagi penulis dalam menuntut ilmu dan telah memberikan seluruh hidupnya untuk membahagiakan penulis.
6. Penghormatan dan penghargaan tiada kira atas motivasi, kasih sayang dan cinta dari saudara dan saudari yang penulis miliki Ahmad Eko Susantono, Dedi Kisworo, dan Desi Astarina yang selalu menjadi acuan dan refleksi penulis untuk meraih kesuksesan hidup.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Palangka Raya yang tidak mungkin penulis satu per satu, terutama dosen dan staff/karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Rekan-rekan penulis ESY angkatan 2013, terutama ESY B angkatan 2013 yang selalu menemani dalam suka dan duka, dan banyak membantu pe dalam menjalani perkuliahan di kampus.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan mendukung demi tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terlebih khususnya bagi pribadi penulis.

Palangka Raya, November 2017

Penulis

DIAH SITA RUKMI
NIM. 130 212 0246

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017

Yang membuat pernyataan,



DIAH SITA RUKMI

NIM. 130 212 0246

MOTTO



أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ
طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik
anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

(Q.S. Al-Ma'un : 1-3)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta, Rusdianto dan Noor Sartolah yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya.

Teruntuk Kakak-kakak saya, Achmad Eko Susantono, Dedy Kisworo dan Desi Astarina yang telah banyak berjuang untuk membantu menyelesaikan kuliah saya, serta memberi motivasi yang sangat berharga dan berguna untuk saya.

Seluruh dosen dan staff akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, serta membantu kelancaran kegiatan akademik saya selama ini.

Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2013, khususnya teman-teman ESY B yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan baik suka maupun duka, serta sangat membantu dalam proses penulisan karya ini hingga terselesaikan.

Untuk teman-teman terbaik saya, Iis Sekarimah, Siti Asiyah, Kholilah, Wahyuni, yang telah saling mensupport satu sama lain dan sama-sama berjuang hingga akhir.

Untuk kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tiada habisnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>B</i> ’	B	Be
ت	<i>T</i> ’	T	Te
ث	’	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i> ’	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Kh</i> ’	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>al</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>R</i> ’	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>S n</i>	S	Es
ش	<i>Sy n</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>d</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>D d</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>T</i> ’	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Z</i> ’	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>F</i> ’	F	Ef
ق	<i>Q f</i>	Q	Qi

ك	<i>K f</i>	K	Ka
ل	<i>L m</i>	L	El
م	<i>M m</i>	M	Em
ن	<i>N n</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>H ’</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Y</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena tasyd d ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘ qqid n</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. T ’ marb tah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni‘matull h</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zak tul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>maj d</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>fur d</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + L m

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur' n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sam ' </i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-fur d</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan Indonesia	24
Tabel 2.4 Daftar Nama Alat Tangkap Ikan Tradisional.....	69
Tabel 3.4 Data Penduduk Kelurahan Danau Tundai.....	71
Tabel 4.4 Jumlah KK Penerima Raskin	84
Tabel 5.4 Jumlah KK Penerima Raskin	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan begitu, keyakinan tentang kemiskinan tidak akan bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, menjadi pandangan yang masuk akal, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat.¹

Problematika kemiskinan telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.

Apa yang terjadi di masyarakat memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa masalah kemiskinan bukanlah semata-mata mengenai ukuran penghasilan maupun pemenuhan kebutuhan pokok. Dipicu oleh berbagai bantuan langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah, dan anggapan bahwa dana-dana sosial yang dibagi-bagi gratis itu “halal” adanya, maka seseorang bisa tiba-tiba menjadi mengaku miskin.

¹ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011, h. 1.

Tanpa disadari, salah satu tantangan pengentasan kemiskinan dalam hal ini adalah kejelasan konsep tentang kemiskinan itu sendiri. Kasus pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) akhir-akhir ini selalu menghadapi masalah ketidakjelasan konsep tentang kemiskinan, disamping buruknya pola pendataan penduduk miskin itu sendiri. Dapat disaksikan bahwa problem pembagian bantuan langsung tunai di tengah masyarakat adalah bagaimana mengatasi ketepatan pengucuran dana dan sasaran yang hendak dicapai.

Konteks seperti inilah yang ingin disebut sebagai kemiskinan dalam ranah mental/psikis. Memahaminya dalam ranah agama, cukup jelas dinyatakan bahwa kemiskinan bukan semata-mata menyangkut kelemahan fisik, melainkan juga kelemahan mental.

Dalam pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kemiskinan yang berasal dari akar kata dari *miskin* dengan awalan *ke* dan akhiran *an* menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan *kefakiran* yang berasal dari asal kata ‘fakir’ dengan awalan *ke* dan akhiran *an*. Dua kata tersebut sering kali juga disebutkan secara bergandengan; *fakir miskin* dengan pengertian “orang yang sangat kekurangan”.²

² Dua kata *fakir* dan *miskin* menurut kamus bahasa Indonesia sebenarnya mempunyai arti yang berbeda, fakir mempunyai dua pengertian: yaitu 1) orang yang sangat kekurangan: orang yang terlalu miskin, 2) orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sedangkan miskin mempunyai pengertian; 1) tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah. Lih. Likman Ali et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 273 dan 660.

Program penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada tingkat perencanaan, tetapi harus adanya sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah, baik di wilayah pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan menyesuaikan karakteristik dari wilayah masing-masing. Dalam rangka pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan harus diupayakan oleh setiap komponen dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk pengentasan kemiskinan masyarakat, dan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan mempunyai produktifitas yang tinggi dalam pengolahan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prinsip *sustainable development*.³

Qardhawi berusaha keras merumuskan konsep Islam yang tepat, sekaligus dapat menjadi solusi bagi sebuah usaha mengentaskan kemiskinan secara tuntas sampai keakar-akarnya. Konsep Qardhawi mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat dan negara. Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedang sarana yang menyangkut masyarakat adalah:

1. Memberi nafkah kepada karib kerabat.
2. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
3. Mengeluarkan zakat secara sukarela.
4. Mengeluarkan sebagai kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan.

³ Syamsir Salam dan Amir Fadhilah, *SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, Jakarta; lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, h. 115.

5. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariyah, wakaf, dan lain-lain.

Sarana yang menyangkut unsur Negara adalah jaminan Baitul Mal Negara, yaitu kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang membutuhkannya, baik dari kalangan muslim maupun dzimmi (non muslim yang hidup dibawah naungan pemerintah Islam).⁴

Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sama seperti kota-kota lain di Indonesia juga telah melakukan usaha pengentasan kemiskinan secara terus menerus dengan berbagai program di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Arus utama pengentasan kemiskinan ada di Dinas Sosial karena tugasnya menangani orang miskin. Dengan program utama: keluarga harapan, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kelompok usaha bersama. SKPD yang lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melewati bidang Pendidikan Luar Sekolah, dengan program keterampilan hidup (life skills) yang memadukan kelompok belajar (kejar) paket A, B, dan C, dengan tambahan keterampilan usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga, seperti kursus menjahit, bordir, dan payet, keterampilan membuat abon dari ikan patin, membuat jajanan pasar dengan bahan singkong, dan lain-lain.⁵

⁴ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 56.

⁵ AMDUK KALTENG, <http://amdukkalteng.blogspot.co.id/2016/07/penelitian-upaya-pengentasan-kemiskinan.html>, diakses pada 01 Maret 2017 pukul 17:11 WIB.

Berbagai program penanganan kemiskinan sudah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain Program Perlindungan Sosial yang bersifat terpadu dan Program Anti Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. Program Perlindungan Sosial antara lain: Jamkesmas, subsidi siswa miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Program Pemda dan program perlindungan sosial lainnya. Program Anti Kemiskinan dan Perlindungan Sosial termasuk kebijakan ekonomi makro, terdiri dari 4 kluster. Kluster 1 yaitu pemberian bantuan bagi masyarakat miskin berbasis keluarga seperti pemberian beasiswa, jamkesmas, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial. Kluster 2 yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berbasis komunitas berupa Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kluster 3 yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berbasis Usaha Masyarakat Kecil-Menengah (UMKM), programnya adalah kredit mikro (KUR). Kluster 4 untuk perumahan, transportasi, air bersih, listrik untuk rakyat miskin, nelayan miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

Program-program tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai instansi, lembaga maupun institusi yang dimiliki oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Untuk Kota/Kabupaten yang memiliki perusahaan juga mempunyai berbagai program untuk membantu pemerintah daerah mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Kota/Kabupaten tersebut, antara lain bantuan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin yang ada di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Program-program Pemda Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kota Palangka Raya yang cukup populer yaitu Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu, Program Kal-Teng Barigas, dan Program Kal-Teng Harati.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“ **UPAYA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah?
2. Bagaimana penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah dalam tinjauan Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah
2. Penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah dalam tinjauan Ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan ataupun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperdalam wawasan penulis dan pembaca khususnya mengenai tindakan pemerintah terhadap penanganan fakir miskin sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
- b. Dalam hal penelitian ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang penanganan fakir miskin.
- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi inspirasi sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya itu sendiri, untuk terus terpacu melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, agar terus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan menjadi Pemerintahan yang baik serta

patut dicontoh oleh daerah-daerah lainnya, sebagaimana Visi dan Misi yang telah dibuat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berupa kajian pustaka, di dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, deskripsi teori terdiri dari teori peran , upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pengertian kemiskinan, produksi dalam ekonomi Islam, distribusi dalam ekonomi Islam, konsumsi dalam ekonomi Islam, dan zakat produktif.

Bab III berupa metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, penentuan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berupa hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data tentang penanganan fakir miskin di kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam tinjauan Ekonomi Islam.

Bab V yaitu merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiat terhadap hasil karya orang lain. Penelaahan ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai motivasi bekerja, adalah sebagai berikut:

Penelitian yang telah dilakukan tentang yang berhubungan dengan kemiskinan yang diantaranya dilakukan oleh **Amelia Renggapratiwi (2009)** dengan judul Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan. Proses penelitian dimulai dengan menganalisis karakteristik kemiskinan perkotaan dan menganalisis respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kesesuaian respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan terhadap karakteristik kemiskinan perkotaan dalam perkembangan Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah. Hal ini ditunjukkan tidak semua karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang sudah direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Lebih

lanjut, karakteristik kemiskinan yang digambarkan oleh keterbatasan pendidikan dan keterampilan belum banyak direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan yang paling dibutuhkan oleh penduduk miskin di Kota Semarang adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bagi mereka. Namun, secara garis besar, strategi anti kemiskinan yang masih banyak dilakukan diseluruh wilayah Kota Semarang adalah pemberian bantuan langsung dan penyediaan pelayanan sosial yang bersifat fisik, sedangkan strategi anti-kemiskinan yang bersifat pemberdayaan melalui pelatihan dan pengembangan usaha kecil dan menengah belum banyak dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.⁶

Penelitian dengan judul Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal yang ditulis oleh **Ahmad Taufiq (2008)**, dalam penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa program P2KP tersebut telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik dan sosial. Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Namun ,disayangkan masih rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam pembentukan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin.⁷

⁶Skripsi Amelia Renggapratiwi, *Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan*, Universitas Diponegoro, 2009.

⁷ Ahmad Taufiq, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, 2008.

Hasil penelitian yang lain telah dilakukan oleh **Gatot Sudaryanto (2010)** yang berjudul: “Studi Tentang Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Puger Kabupaten Jember”. Adapun tahapan penelitian ini adalah persiapan, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan pengkajian data, serta merumuskan hasil kajian melalui kegiatan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer berupa kuisioner dilakukan kepada sejumlah 40 KK keluarga miskin sebagai sampel keluarga miskin. Berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, maka disimpulkan bahwa pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Puger adalah (a) kemiskinan sub-sistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Puger yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih; (b) kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah faktor ekonomi, Sosial, dan faktor pendidikan.⁸

Demikian pula penelitian yang dilakukan penulis sejenis dengan penelitian terdahulu, namun fokus pembahasannya berbeda, perbedaannya yaitu pada konsep penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada

⁸ Gatot Sudaryanto, *Studi Tentang Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Puger Kabupaten Jember*, 2010.

karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan dalam menanggulangi. Sedangkan, penelitian penulis lebih berfokus kepada efektivitas penanganan fakir miskin itu sendiri.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁹

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹⁰

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h. 221.

¹⁰ *Ibid.*, h. 223.

¹¹ *Ibid.*, h. 224

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:¹²

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

¹² *Ibid.*, h. 225

berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa inggris (*function*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹³

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasa, oleh karena itu dalam

¹³ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004, h.

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat)
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burgher, kelompok rakyat dan badan.¹⁴

Pengertian diatas menunjukan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

2. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami

¹⁴ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT . Rineka Cipta, 2001, h. 6.

rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran.¹⁵

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

”Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka”.¹⁶

Al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyah* menyebut beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi :

- a. Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
- b. Pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi menuntut demikian.
- c. Penggunaan keuangan negara untuk tujuan-tujuan yang menjadi kewajiban negara.

¹⁵ Rahman Elharawy, rahman.elharawy.web.id/2011/12/peran-negara-dalam-perspektif-ekonomi.html?m=1, diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 13:15 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

Dalam ajaran islam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan bukan hanya tugas individual masyarakat. Setiap individu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan seluruh masyarakat-masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula negara harus menjamin kebutuhan dasar dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan ini, sebab negara dibentuk memang untuk mengemban berbagai tugas kolektif. Negara memiliki perangkat dan sumber daya –termasuk keuangan– untuk memberikan jaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan ketidaksempurnaan. Negara bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi. Untuk mengelola perekonomian, pemerintah dalam sistem ekonomi islam akan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal dengan pendekatan multidisiplin.¹⁷

Akan tetapi, sebagaimana pasar, pemerintah juga memiliki kelemahan-kelemahan (government failure). Beberapa kelemahan dari pemerintah antara lain:

- a. Pemerintah sering kali tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat;

¹⁷ Muchtar Unisma, almuslimunfoundation.blogspot.co.id/2014/04/pemerintah-dalam-ekonomi-islam.html?m=1, diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 13:37 WIB.

- b. Pemerintah sering kali juga memiliki banyak masalah structural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi;
- c. Keterlibatan pemerintah sering kali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian sehingga justru menghambat mekanisme pasar;
- d. Intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian dari pasar sehingga pasar tidak dapat berjalan dengan alamiah. Berbagai kegagalan pemerintah ini menegaskan pentingnya peran aktif dari masyarakat secara langsung.

Salah satu teori ekonomi syariah yang dikembangkan oleh ahli pemikir Islam, Ibnu Khaldun, berupa sebuah rumusan berupa kebijaksanaan politik pembangunan, mungkin, dapat diaplikasikan dalam perkembangan Ilmu Ekonomi Islam saat ini. Rumusan Ibnu Khaldun tersebut dikenal sebagai “Dynamic Model of Islam” atau Model Dinamika. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan, terdiri atas:¹⁸

- a. Kekuatan pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah;

¹⁸ *Ibid.*

- b. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemerintahan;
- c. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat;
- d. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan;
- e. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan;
- f. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan;
- g. Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya;
- h. Pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Dalam ajaran welfare state Islami, mengupayakan agar setiap orang mengikuti ajaran Syariah dalam urusan duniawi mereka merupakan hal yang penting. Negara harus tetap mengawasi semua tingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan, dan ketidakadilan sebagai prasyarat kualitas yang dibutuhkan untuk keharmonisan sosial dan pembangunan berdasarkan keadilan. Selain itu, negara harus menjamin pemenuhan hukum dan menghormati hak milik individu serta menanamkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁹

3. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).

¹⁹ *Ibid.*

Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dengan keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Istilah pemberdayaan adalah terjemah dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.²⁰

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai matapencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.²¹

²⁰ Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001, h. 41-42.

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 59-60.

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²²

4. Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana

²² Ashe Satria, <http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaan.html>, diakses pada Selasa 04 April 2017 pukul 17:40 WIB.

yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansi>yyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya), ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang *mathgi>yyan* (mampu membuat seseorang zalim; baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya).²³

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah: yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.²⁴

Dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman mengenai pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolak ukur. Dengan adanya tolak ukur ini, mereka yang tergolong sebagai orang miskin atau yang berada dalam taraf kehidupan yang miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang dibedakan dari mereka yang tergolong miskin. Tolak ukur yang umum dipakai adalah yang berdasarkan atas tingkat pendapatan per waktu kerja (untuk Amerika digunakan ukuran setahun sebagai waktu kerja, sedangkan di Indonesia digunakan ukuran waktu kerjasebulan).

²³ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, h. 24.

²⁴ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984, h. 12.

Tolak ukur yang lain adalah yang dinamakan tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna sebuah keluarga dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak.

Walaupun para ahli ilmu-ilmu sosial sependapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah sesuatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi tersebut.²⁵

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini, yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran. Menurut BPS, dapat dikatakan miskin apabila pengeluarannya dibawah nominal Garis Kemiskinan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 13.

²⁶ Syamsir Salam dan Amir Fadhilah, *Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 104.

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan Indonesia

NO	TAHUN	PERKOTAAN	PEDESAAN
1.	2014	Rp. 326,900	Rp. 296,700
2.	2015	Rp. 356,400	Rp. 333,000
3.	2016	Rp. 372,100	Rp. 350,400

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.²⁷ Misalnya di tahun 2016, apabila seorang penduduk memiliki pengeluaran kurang dari Rp. 372,100 maka penduduk tersebut dapat dikatakan miskin.

Menurut jenisnya kemiskinan dibedakan dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan poporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Kedua, kemiskinan absolut yaitu suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan dan pendidikan.²⁸

Sedangkan menurut akar penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama,

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2017*, h. 152.

²⁸ Bagong Suryanto, *Perangkap Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*, Yoyakarta: Aditiya Medika, , 1996, h. 1-2.

kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama dari segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat. Selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut kemiskinan struktural.²⁹

Kata miskin pada dasarnya mengandung makna keterperdayaan atau ketidakmampuan atau kesenjangan (gap) antara antara kebutuhan dengan tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan tersebut yang mengakibatkan orang/masyarakat tersebut termarginalkan dalam segala hal. Menurut para pemerhati kemiskinan, kemiskinan dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk, yaitu:

- a) Kemiskinan absolut, yaitu tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi

²⁹ *Ibid.*, h. 3-4.

kebutuhan minimum (pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

- b) Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya.
- c) Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- d) Kemiskinan kultural adalah mengacu pada persoalan budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehiupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.³⁰

Disamping hal diatas, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat klasifikasi kemiskinan ke dalam tiga kelompok yang semula pendekatannya terhadap “rumah tangga miskin (RTM)”, yaitu: 1) hampir miskin; 2) miskin; dan 3) sangat miskin.

BPS dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

³⁰ Syamsir Salam dan Amir Fadhilah, *Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, ... h. 105.

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Tingkat kemiskinan yaitu:

1. Hampir miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila tidak bisa memenuhi sebanyak 6 s/d 9 variabel dari indikator di atas.

2. Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila tidak bisa memenuhi sebanyak 9 s/d 12 variabel dari indikator di atas.

3. Sangat miskin/fakir miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk sangat miskin/fakir miskin apabila tidak bisa memenuhi sebanyak 12 s/d 14 variabel dari indikator diatas.³¹

Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemukakan tolak ukur kemiskinan dengan pendekatan lebih operasional, yakni membagi ke dalam kategori, prasejahtera, sejahtera I, II, III, dan sejahtera III plus dan dikatakan miskin adalah keluarga prasejahtera.

Prasejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minial, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berecana. Secara operasional mereka tampak dalam ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya

³¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/index.php/publikasi>, diakses pada Rabu, 01 November 2017 pukul 21:07 WIB.

- b) Makan minimal 2 kali per hari
- c) Pakaian lebih dari satu pasang
- d) Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah
- e) Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuha sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara oprasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

- a) Menjalankan ibadah secara teratur
- b) Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan
- c) Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun
- d) Luas lantai rumah rata-rata 8m^2 per anggota keluarga
- e) Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin
- f) Semua anak berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun bersekolah
- g) Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap
- h) Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Keluarga prasejahtera dan Sejahtera I diatas dibagi atas dua kelompok yaitu:

- a) Karena alasan ekonomi/keluarga miskin yaitu keluarga yang menurut kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga semacam ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang dikembangkan oleh BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin atau sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya dengan baik,
- b) Karena alasan non ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinannya bukan karena pada hartaluang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal sebenarnya ia mampu untuk memplester lantai rumahnya atau kalau anaknya sakit tidak dibawa diperiksa ke puskesmas.³²

Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1996:11) ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, antara lain adalah:

- a) Faktor internal
 - 1) Kesakitan,
 - 2) Kebodohan,
 - 3) Ketidaktahuan,
 - 4) Ketidakterampilan,

³² *Ibid*, h. 106.

- 5) Keteringgalan teknologi,
 - 6) Ketidakpunyaan modal.
- b) Faktor eksternal
- 1) Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan,
 - 2) Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga,
 - 3) Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan.³³

Sementara itu menurut Kajian tim peneliti STKS Bandung, dimensi dalam kemiskinan antara lain mencakup:

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
- b) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
- c) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.

³³ *Ibid*, h. 107.

- g) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil).³⁴

5. Upaya Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini, dan karenanya menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan butir II paragraf 7 dokumen Johannesburg tentang “Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan (*Plan of Implementation of The World Summit on Sustainable Development*)”.³⁵

Kewajiban negara terkait dengan kemiskinan antara lain mencakup:

- a) Negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar yang tidak terpenuhi oleh individu, keluarga dan masyarakat.
- b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c) Negara berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar.

³⁴ *Ibid*, h. 109.

³⁵ *Ibid*, h. 117.

- d) Negara berkewajiban mendorong keluarga dan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan.
- e) Negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar.
- f) Negara berkewajiban memberikan kompensasi kepada kelompok yang beresiko akibat kebijakan negara.
- g) Negara menetapkan standar pelayanan minimal dalam pelayanan sosial dasar untuk menanggulangi kemiskinan.
- h) Negara berkewajiban mendistribusikan pelaksanaan tugas secara proporsional kepada kementerian sesuai dengan kewenangannya dalam penanggulangan kemiskinan antara pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁶

Program penanganan kemiskinan sudah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain Program Perlindungan Sosial yang bersifat terpadu dan Program Anti Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. Program Perlindungan Sosial antara lain: Jamkesmas, subsidi siswa miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Program Pemda dan program perlindungan sosial lainnya. Program Anti Kemiskinan dan Perlindungan Sosial termasuk kebijakan ekonomi makro, terdiri dari 4 kluster. Kluster 1 yaitu pemberian bantuan bagi masyarakat miskin berbasis keluarga seperti pemberian beasiswa, jamkesmas, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial. Kluster 2 yaitu

³⁶ *Ibid.*, h. 122-123.

pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berbasis komunitas berupa Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kluster 3 yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berbasis Usaha Masyarakat Kecil-Menengah (UMKM), programnya adalah kredit mikro (KUR). Kluster 4 untuk perumahan, transportasi, air bersih, listrik untuk rakyat miskin, nelayan miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

Program-program tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai instansi, lembaga maupun institusi yang dimiliki oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Untuk Kota/Kabupaten yang memiliki perusahaan juga mempunyai berbagai program untuk membantu pemerintah daerah mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Kota/Kabupaten tersebut, antara lain bantuan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin yang ada di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Program-program Pemda Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kota Palangka Raya yang cukup populer yaitu Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu, Program Kal-Teng Barigas, dan Program Kal-Teng Harati.³⁷

Keefektifan program ini dapat dilihat pada variabel menurut menurut Budiani (2007), yaitu:

1. Ketepatan Sasaran
2. Sosialisasi Program

³⁷ AMDUK KALTENG, <http://amdukkalteng.blogspot.co.id/2016/07/penelitian-upaya-pengentasan-kemiskinan.html>, diakses pada 01 Maret 2017 pukul 17:11 WIB.

3. Tujuan Program

4. Pemantauan Program³⁸

6. Produksi dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Produksi

Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemashlahatan, kebutuhan dan kewajiban. Demikian pula, konsumsi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut Yusuf Qardhawi (1995), secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian ummat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal. Karena itu dalam sebuah perusahaan misalnya, menurut M.M. Metwally³⁹ asumsi-asumsi produksi, harus dilakukan untuk barang halal dengan proses produksi dan pasca produksi yang tidak menimbulkan ke-*mu>dharatan*. Semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produksi.

Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan

³⁸ Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, UNUD: Denpasar, 2007, h. 53.

³⁹ M.M. Metwally, *A Behavioural Model of An Islamic Firm,” Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif*, Longman Malaysia 1992, h. 131-138.

Allah SWT sehingga menjadi mashlahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁰

b. Prinsip-prinsip Produksi

Prinsip-prinsip produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan memproduksi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berproduksi dalam lingkaran halal

Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Pada dasarnya, produsen pada ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis. Adapun sikap seorang muslim sangat bertolak belakang. Ia tidak boleh menanam apa-apa yang diharamkan. Seorang muslim tidak boleh menanam segala jenis tumbuhan yang membahayakan manusia, seperti tembakau yang menurut keterangan WHO, sains, dan hasil riset berbahaya bagi manusia. Selain dilarang menanam tanaman-tanaman yang berbahaya bagi manusia, seorang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang

⁴⁰ Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Muhammad bin Sa'id bin Naji Al-Ghamidi, *Ushul Al- Iqtishad Al-Islami*, h. 59-60.

haram, baik haram dikenakan maupun haram dikoleksi. Misalnya membuat patung atau cawan dari bahan emas dan perak, dan membuat gelang emas untuk laki-laki. Syariat juga melarang memproduksi produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme, baik dalam opera, film, dan musik.⁴¹

2. Keadilan dalam berproduksi

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederhana, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Setiap orang dinasihatkan berhubungan secara jujur dan teratur serta menahan diri dari hubungan yang tidak jujur sebagaimana tersebut dalam QS An Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997. h. 117-118.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usaha dirinya, tetapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain.⁴²

Selain itu dalam QS Ar Rahman : 9

وَأَقِيمُوا الزَّوْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Orang Islam tidak boleh tertipu daya karena contoh kualitas yang baik, lalu menjual barang-barang yang rendah mutunya atau mengurangi

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995, h. 215-217

timbangan.⁴³ Karena pada dasarnya perbuatan tidak adil dan salah akan merusak sistem ekonomi dan akhirnya akan menghancurkan keseluruhan system sosial. Dengan demikian, Al Quran menyetujui nilai-nilai yang mulia dalam persamaan hak, keadilan, kooperasi, dan pengorbanan dalam rangka mereorganisasikan lingkungan sosio-ekonomi masyarakat Islam.

3. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami.⁴⁴

Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Metwally (1992) mengatakan "perbedaan dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya". Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Selain itu Islam juga mengajarkan adanya skala prioritas (dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah) dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan, larangan ini juga berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya.

4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek social-kemasyarakatan

⁴³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 188-189.

⁴⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta : Jalasutra, 2003, h. 156

Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen (stock holders) saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan (stake holders). Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi.

5. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.⁴⁵

Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Sikap terserbut dalam Al-Qur'an sering disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal ini akan membawa implikasi bahwa prinsip produksi bukan sekedar efisiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya.

⁴⁵ *Ibid*, 157-158

7. Distribusi dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli.⁴⁶

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.⁴⁷ Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dula>h* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dula>h* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.⁴⁸

Q.S. Al-Hashr: 7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution, *et. al*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, h.119

⁴⁷ Meity Taqdir Qodratilah, *et.al.*, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, h. 100.

⁴⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, h. 46-48.

Artinya ; Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hashr : 7).⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.⁵⁰

Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah.

Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

⁵⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, h. 50.

berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.⁵¹

b. Tujuan Distribusi dalam Islam

Ekonomi Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan–tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakana bahwa system distribusi ekonomi dalam ekonomi islam mempunyai andil bersama system dan politik syariah lainnya-dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :

1. Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranaya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang islam yang diharapkan kuat keislamannya. Sebagaimana system distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

⁵¹ *Ibid.*, h. 77.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman pada Firman Allah QS Ali Imran: 140

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ١٤٠

Artinya: Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”

2. Tujuan Pendidikan,

Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surah at-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (Maksudnya: zakat itu membersihkan

mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) *dan mensucikan* (Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka) *mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
 - b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).
3. Tujuan sosial,

Yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah:273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat
- c. Mengikis sebab – sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.
- d. Keadilan dalam distribusi mencakup
 - 1) Pendistribusian sumber –sumber kekayaan

2) Pendistribusian pemasukan diantara unsur–unsur produksi

3) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

4. Tujuan Ekonomi,

Yakni pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu.⁵²

Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor–faktor

⁵² Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 93-94

yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi ; seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.

3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبَّهَا
وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٦٥

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan

buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”

Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang – orang yang membelanjakan hartanya karena keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah – ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

c. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

1) Larangan riba, dan *gha>rar*

Kata riba dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *ar-riba>* bermakna *zada> wa> nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihi keuntungan dari saah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.⁵³

2) Kebebasan

⁵³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 77.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut. Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.⁵⁴

3) Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Az-Zariat 19):

⁵⁴ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, h. 155.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁵⁵

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.⁵⁶

4) Keadilan dalam distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata ‘*adala*, yang dalam al-Qur‘an terkadang disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl* di dalam al-Qur‘an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl* (keadilan).⁵⁷

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

⁵⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h 85.

⁵⁷ *Ibid.*

8. Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility(nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu : kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier.

Sifat barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Shatibi dalam Islam adalah At-Tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Monzer Kahf mengembangkan pemikiran tentang Teori Konsumsi Islam dengan membuat asumsi : Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba, mudharabah wujud dalam perekonomian, dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Konsep Islam yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan.”

Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*).
2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.

3. Penghapusan Riba; menjadikan system bagi hasil (profit-loss sharing) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) termasuk bunga (*interest rate*).
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, out put produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

Namun pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi (*economic behavior*) sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi.

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama tadi; mashlahah, kebutuhan dan kewajiban.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis.
3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*); ego, keinginan dan rasionalisme.

Demikian pula dalam konsumsi, Islam memposisikan sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju fala>h (kebahagiaan dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah mashlahah atas kebutuhan dan kewajiban.

Sementara itu Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Dengan demikian aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akherat (fala>h), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya.⁵⁸

An-Nahl (16): ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٤

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.

Pada ayat diatas secara tegas, terdapat prinsip halal dan baik, prinsip ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip syukur dan prinsip tauhid. Dengan prinsip-prinsip demikian, maka pola konsumsi seseorang dan juga

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam," Rabbani Press, Jakarta (1995), h. 70.

masyarakat, diarahkan kepada kebutuhan dan kewajiban berdasarkan standar-standar prinsip di atas. Demikian pula, dalam ayat-ayat berikut;

Al-Isra (17): ayat 26-28,

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ
رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ ٢٨

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (27) Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas. (28)

Al-A'raf (7) : ayat 31-32

﴿يَبْنِيْٓءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ ٣١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۚ ٣٢

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.

Pada kedua ayat di atas, terdapat prinsip menjauhkan diri dari kekikiran baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Demikian pula terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan aktivitas konsumsi. Dan prinsip pertanggung jawaban dalam setiap aktivitas konsumsi.⁵⁹

9. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.

Pengertian produktif menurut Asnaini (2008) lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang

⁵⁹ *Ibid.*

artinya: zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁶⁰

Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁶¹

C. Kerangka Pemikiran

Kebijakan dan program bantuan sosial yang merupakan *crash program* dalam rangka penanggulangan kemiskinan untuk kelompok rentan perlu diimplementasikan secara baik khususnya dalam hal kriteria dan identifikasi kelompok sasaran penerima. Bidang kesehatan merupakan komponen penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan

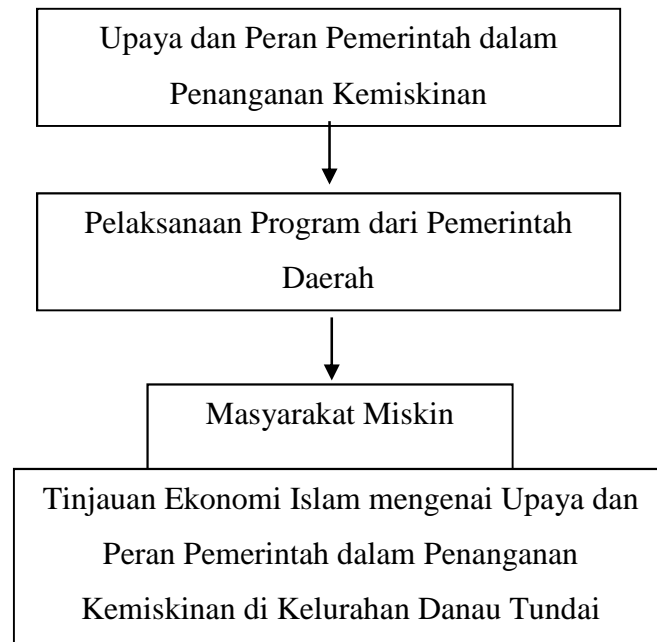
⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 63.

⁶¹ *Ibid.*

program ini apabila akan diteruskan perlu dilakukan secara komprehensif berbasis keluarga.

Pada akhirnya dampak dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat tergantung pada kapasitas si miskin sendiri yang tercermin dalam *knowledge*, *attitude*, dan *practice* untuk berjuan keluar dari belenggu kemiskinan.

Pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat berupaya menanggulangi tingkat kemiskinan di daerah yang kian hari semakin kompleks permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan konsep penelitian ini, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan observasi awal untuk membuat latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan judul dan pembuatan proposal penelitian pada Mei 2016. Selanjutnya pada Juli 2017 penulis mengajukan surat izin melakukan penelitian selama 2 bulan kepada Jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dengan rincian dua bulan pertama penulis melaksanakan kegiatan penelitian lapangan pada Agustus 2017. Kemudian penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dan membuat laporan hasil penelitian pada September 2017 hingga Oktober 2017.

Adapun tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Danau Tundai, Kantor Kecamatan Sebangau, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, serta Kawasan Kelurahan Danau Tundai Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan data

tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁶²

Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁶³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus di Kelurahan Danau Tundai Kota Palangka Raya.

Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.⁶⁴ Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.⁶⁵ Adapun kasus yang ingin diteliti adalah mengenai efektivitas program-program pemerintah dalam menangani fakir miskin dan upaya pengentasan kemiskinan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Hendarso Suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci

⁶² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet. 6*, Bandung: Alfabet, 2010, h. 3.

⁶⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/studi_kasus, diakses pada Rabu, 01 Maret 2017 pukul 17:03 WIB.

⁶⁵ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode, Ter. M. Faudzi Mudzakir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 1.

adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁶⁶

Adapun informan kunci atau subjek penelitian ini adalah pelaku atau orang yang dijadikan peneliti sebagai orang yang diteliti, Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Kasi Kesos Kecamatan Sebangau, Lurah Danau Tundai dan warga Kelurahan Danau Tundai Kota Palangka Raya yang dipilih secara selektif guna membangun generalisasi teoritik.⁶⁷ Sedangkan objek dari penelitian ini adalah informasi mengenai data-data keefektifan program kerja pemerintah daerah dalam menangani fakir miskin dan upaya mengentaskan kemiskinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mempermudah pengumpulan data. Teknik-teknik itu antara lain sebagai berikut:

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 171.

⁶⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 165.

1. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.⁶⁸ Menurut Moleong, yang diamati disini adalah fenomena sosial. Data yang diperoleh dari teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum Kelurahan Danau Tundai Kota Palangka Raya.
- b. Gambaran umum strategi pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan khususnya pada Kelurahan Danau Tundai Kota Palangka Raya.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara Tanya jawab langsung dengan responden dan mendengarkan langsung informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁶⁹ Melalui teknik ini, data yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Apasaja program kerja pemerintah daerah dalam menangani fakir miskin di kelurahan Danau Tundai?
- b. Kapan program kerja pemerintah daerah dalam menangani fakir miskin di kelurahan Danau Tundai mulai diberlakukan?
- c. Apakah program kerja tersebut sudah berjalan efektif?

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993, h. 191.

⁶⁹ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 70.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto adalah proses mencari data sumber berupa catatan, transkrip, buku, agenda, mengenai masalah yang sedang diteliti. Melalui teknik ini data yang akan diperoleh antara lain:

- a. Data penduduk miskin kelurahan Danau Tundai
- b. Program kerja pemerintah daerah dalam menangani fakir miskin di kelurahan Danau Tundai
- c. Foto-foto selama penelitian

E. Pengabsahan Data

Proses selanjutnya adalah melakukan pengabsahan data, dalam hal ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil wawancara dari masing-masing responden.
2. Membandingkan data-data hasil observasi dengan hasil wawancara.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir atau mengurutkan data yang telah diperoleh dan dilakukan pengabsahan menjadi lebih sistematis sehingga ditemukan suatu pola dan tema serta menghasilkan teori. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas penanganan fakir miskin khususnya di Kecamatan Pahandut Kota Palangka raya.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian. Karena data yang kurang valid akan mengurangi keilmiahan hasil penelitian.
3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari kancan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan dan digambarkan apa adanya khususnya tentang pengumpulan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan penelitian.
4. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu menarik kesimpulan mengenai tindakan pemerintah terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kelurahan Danau Tundai Kota Palangka Raya, yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari

data yang telah dianalisa. Ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.⁷⁰

⁷⁰ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 199, h. 16-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Danau Tundai

1. Keadaan Geografis Kelurahan Danau Tundai

Kelurahan Danau Tundai merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 4.250 Hektare. Kelurahan Danau Tundai merupakan daerah dataran rendah, kawasan rawa dan aliran sungai. Letak Kelurahan Danau Tundai pada Daerah Kawasan Hutan dan Danau.

Kelurahan Danau Tundai mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari koordinat 02°10'00'' LS dan 114°00'00'' BT Ke Timur sampai koordinat 02°10'22'' LS dan 114°02'00'' BT
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Kameloh Baru dari 02°13'36'' LS dan 114°00'00'' BT ke arah Selatan (180o) sampai Kanal PLG Tundai Km.4,2
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Bereng Bengkel dimulai dari Kanal PLG Tundai Km.4,2 ke Barat-Sungai Kahayan ke arah Hulu sampai pada titik koordinat 02°13'36'' LS dan 114°00'00'' BT

- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pinang dimulai dari koordinat $02^{\circ}13'36''$ LS dan $114^{\circ}00'00''$ BT ke Utara (0) sampai di ujung jalan SMP 12 ke arah Timur Laut menuju

- e. Sungai Kahayan pada koordinat 02°14'35'' LS dan 114°00'00''

BT

Jarak tempuh Palangka Raya ke Kelurahan Danau Tundai \pm 45 km, dengan waktu tempuh menggunakan Transport air (Speedboat) \pm 15 menit, Kelotok \pm 1 jam kemudian dari Kecamatan ke Danau Tundai \pm 25 km dengan waktu tempuh menggunakan kelotok \pm 1 jam.⁷¹

2. Keadaan Sosial dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, jumlah penduduk Kelurahan Danau Tundai pada Tahun 2017 berjumlah 235 jiwa dari 65 KK. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Danau Tundai adalah Nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan pun masih menggunakan alat tradisional seperti selambau (jaring besar), tampirai, rawai atau banjur, rengge, unjun, jala, lukah alias bubu, dan lunta.

Tabel 2.4 Daftar Nama Alat Tangkap Ikan Tradisional

No.	Nama Alat	Keterangan
1.	Lukah	Alat tangkap ikan yang terbuat dari bambu berbentuk silinder dengan panjang 1,5 meter dengan diameter 30 cm.
2.	Lunta	Alat ini berupa jaring yang digunakan untuk menangkap ikan

⁷¹ www.kelurahanda.blogspot.co.id/?m=1, diakses pada hari Rabu 13 September 2017 pukul 14:15 WIB.

		dengan cara menebarkannya ke dalam air.
3.	Rengge	Jala yang dipasang membentang di sungai atau di danau.
4.	Jala Kalabau	Alat ini digunakan untuk menangkap ikan kalabau, alat ini digunakan pada kedalaman air antara 2-3 meter.
5.	Tampirai	Alat ini bentuknya sama seperti Lukah. Digunakan untuk menangkap ikan - ikan kecil seperti ikan seluang.
6.	Rawai atau Banjur	Alat tangkap ikan yang terdiri dari sejumlah mata kail yang dipasangkan pada panjangnya tali yang mendatar.
7.	Salambau	Jala besar yang ditenggelamkan sampai ke dasar sungai dengan bagian ujung-ujungnya tetap berada di permukaan air sehingga bisa menghalang/mengurung ikan yang melintas di atasnya.
8.	Unjun atau Wintan	Kail yang menggunakan joran dan nilon yang untuk memancing ikan.

Sumber: Observasi Penulis

Untuk dapat memiliki alat tangkap ikan diatas, nelayan Danau Tundai membuatnya sendiri dengan bahan yang mudah di dapatkan di sekitar Danau Tundai. Akan tetapi, untuk alat tangkap ikan sejenis jala, nelayan Danau Tundai harus membelinya di pasar atau toko penyedia alat tangkap ikan.

Penduduk Kelurahan Danau Tundai mayoritas beragama Islam. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki – laki berjumlah 124 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 111 jiwa. Kepala Keluarga berjumlah 65 KK yang tersebar dalam 2 RT.

Tabel 3.4 Data Penduduk Kelurahan Danau Tundai

NO	RT	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	
1	I	70	54	124	39
2	II	54	57	111	26
Jumlah		124	111	235	65

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Danau Tundai

Fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Kelurahan Danau Tundai yaitu meliputi SDN (Sekolah Dasar Negeri) 01 Danau Tundai, SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) Satu Atap 7 Palangka Raya, dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang baru beroperasi selama 3 bulan.

Rata-rata pendidikan masyarakat Danau Tundai hanya sampai tingkat SMP. Untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) mereka harus bersekolah diluar Danau Tundai seperti Bukit Pinang, Bereng Bengkel, Kalampangan, dan pusat kota Palangka Raya.

Di Kelurahan Danau Tundai juga terdapat fasilitas tempat ibadah satu-satunya yaitu mesjid Nurul Iman. Tidak adanya fasilitas ibadah lainnya (selain mesjid) dikarenakan penduduk Danau Tundai seluruhnya

adalah muslim, kecuali satu KK non muslim yang merupakan satu-satunya guru/PNS yang memutuskan untuk tinggal di Danau Tundai.⁷²

Tempat tinggal warga di Kelurahan Danau Tundai adalah bangunan tidak permanen. Hal ini dikarenakan kondisi alam Danau Tundai. Apabila air sungai naik/pasang rumah warga kerap kali terendam air sehingga sangat tidak memungkinkan bagi warga setempat untuk membuat bangunan permanen.



Gambar 1 Kondisi Rumah Warga Danau Tundai Ketika Terendam Air Pasang

Selain itu, untuk air minum dan memasak juga tersedia alat penyaring air bersih untuk warga desa yang berada di rumah ketua RW (Rukun Warga) Danau Tundai dan dikenakan biaya Rp. 3000,- per galon air. Akan tetapi, fasilitas air bersih tersebut hanya digunakan oleh beberapa KK saja karena kebiasaan masyarakat setempat mengkonsumsi air yang sudah di tawas⁷³. Menurut mereka, menampung air dan ditawas

⁷² Observasi penulis pada Jumat 22 September 2017.

⁷³ Tawas (Alum) adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf. Kristal tawas ini cukup mudah larut dalam air, dan kelarutannya berbeda-beda tergantung

dirumah sendiri lebih mudah dan murah daripada harus mengambil air bersih dari rumah ketua RW.

Fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kelurahan Danau Tundai yaitu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Mawar dan Polindes (Pondok Bersalin Desa). Akan tetapi, pelayanan kesehatan di Kelurahan Danau Tundai tergolong buruk. Petugas kesehatan yang tidak tinggal di Danau Tundai, melainkan tinggal di pusat Kota Palangka Raya mengakibatkan buruknya layanan kesehatan. Ketika dalam kondisi darurat warga membutuhkan pelayanan medis, mereka harus pergi ke pusat Kota Palangka Raya atau Bereng Bengkel yang sudah mempunyai fasilitas kesehatan sekelas Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama dan penanganan yang sesuai.

Bukan hanya bidan dan tenaga medis lainnya yang tidak tinggal di Kelurahan Danau Tundai, perangkat desa atau staff kelurahan bahkan Lurah Danau Tundai juga tidak tinggal disana. Sangat disayangkan, untuk membenahi desa, menganalisis permasalahan dan mengentaskan kemiskinan sudah seharusnya para PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut tinggal di daerah tugasnya. Untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat pun para staff kelurahan hanya berkunjung sebanyak 3 kali dalam seminggu.

pada jenis logam dan suhu. Tawas dikenal sebagai flocculator yang berfungsi untuk mengumpulkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. (Sumber: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tawas>, diakses pada Selasa, 07 November 2017 pukul 18:58 WIB).

G. Penyajian Data

Penyajian data hasil penelitian ini penulis terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya kepada para subjek-subjek penelitian yaitu Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Kasi Kesos Kecamatan Sebangau, Lurah Danau Tundai dan warga Kelurahan Danau Tundai. untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan upaya dan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di kelurahan Danau Tundai.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

a. Narasumber Pertama

Berikut adalah identitas narasumber pertama yang penulis wawancara:

Nama : FA

Pekerjaan/Jabatan : Lurah Danau Tundai

Narasumber pertama adalah Bapak FA yang merupakan Lurah Danau Tundai. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak FA mengenai Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai, penulis

menanyakan perihal program-program pengentasan dan bantuan sosial bagi masyarakat Danau Tundai. Berikut penuturan beliau:

“...Program pengentasan kemiskinan di danau tundai yang melalui kelurahan yaitu Kota-Ku dulunya BKM tapi tahun 2017 sekarang jadi Kota-ku, Raskin, BLT, kemudian rencana ke depan akan ada bantuan bedah rumah. Rencana tahun ini (2017), kalo gak tahun depan. Sudah didata juga oleh tim pendataan langsung. Jadi kelurahan tidak bisa intervensi. Kalo bantuan lain-lain seperti sembako itu sering aja ke danau tundai, dibagi semua warga. Apalagi kalo pilkada”⁷⁴

Kemudian penulis bertanya mengenai deskripsi dan detail program Kota-ku. Berikut hasil wawancaranya:

“Kota-ku ini masyarakat memilih program-program yang dibutuhkan mereka seperti fisik, pembangunan-pembangunan yang di danai oleh pemerintah pusat. Dari Kota-Ku itu masyarakat memilih sendiri koordinator dan basecampnya ada di bappeda. Masyarakat memilih anggota kepengurusan sendiri, keuangan pun langsung kepada masyarakat. Program mereka dinahkodai oleh kelurahan dan yang berkepentingan adalah lurah. Tahun lalu, tahun 2016 jembatan titian jalan itu sudah. Dan tahun 2017 ini akan kami bangun PAUD dan titian menuju ke danau tundai.”⁷⁵

Selanjutnya penulis bertanya mengenai program raskin.

Berikut penuturan beliau:

“iya, raskin juga ada. Tahun ini penerima raskin di Danau Tundai itu semua KK. Jumlah KK nya ada 65. “saya tau siapa saja yang berhak menerima Raskin, tapi kan semua masyarakat di danau tundai minta jatah beras. Jadi mau gimana lagi, masyarakat mintanya adil, tapi adil/tidak adil. Daripada ribut-ribut yasudah bagi rata saja.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak F.A, program Kota-Ku sudah berjalan sejak tahun 2010. Sebelum

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak FA pada 30 Agustus 2017

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak FA pada 30 Agustus 2017

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak FA pada 30 Agustus 2017

berganti nama menjadi Kota-Ku, program ini dulunya bernama Badan Keswadayaan Masyarakat atau lebih dikenal dengan BKM. Tujuan utama program ini adalah untuk memimpin masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih terorganisir, terarah dan berkelanjutan. Anggota Kota-Ku terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama yang dipilih melalui suatu mekanisme pemilihan anggota Kota-Ku, dimana proses pemilihannya tanpa kampanye dan tanpa pencalonan.

Selain Kota-Ku, program pengentasan kemiskinan lainnya adalah Raskin. Tujuan dari pendistribusian Raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Narasumber Kedua

Berikut adalah identitas narasumber kedua yang penulis wawancara:

Nama : AN

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Kesos Kecamatan Sebangau

Narasumber kedua adalah Bapak AN yang merupakan Kasi Kesos Kecamatan Sebangau. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak AN mengenai Peran dan Upaya Pemerintah

dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai, penulis menanyakan perihal program-program pengentasan dan bantuan sosial bagi masyarakat Danau Tundai. Berikut penuturan beliau:

“Bantuan dan program kemiskinan yang ada di Danau Tundai itu ada BKM sekarang Kota-ku namanya, trus ada raskin, tadi saya baru bahas penerima raskin tahun ini sama pak lurah, trus BLT juga masih ada.”⁷⁷

Kemudian penulis bertanya mengenai detail dan pelaksanaan program. Berikut hasil wawancaranya:

“BKM itu program berupa pembangunan fasilitas fisik desa, kalau BLT atau PKH itu bantuan berupa uang tunai, kalau raskin kita udah tau itu pemberian beras subsidi, tahun ini 65 KK yang dapat bantuan raskin, kaya ngasih ikan sih ya, bukan ngasih kail jadi ngarep dapat terus. Harusnya kan tiap tahun berkurang jumlahnya ini malah nambah. Tapi ya mau gimana lagi. Mengenai mekanisme pembagiannya kecamatan gak ikut campur, udah ada lurah dan perangkat desa lainnya yang bagi-bagi. Kecamatan cuma nerima datanya aja. Nanti langsung wawancara pak lurahnya aja. Kebetulan beliau lagi ada disini”⁷⁸

c. Narasumber Ketiga

Berikut adalah identitas narasumber ketiga yang penulis wawancara:

Nama : RF

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan
Lingkungan Bidang Penanganan Fakir
Miskin Dinas Sosial Kota Palangka Raya

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak AN pada 28 Agustus 2017

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak AN pada 28 Agustus 2017

Narasumber ketiga adalah Ibu RF yang merupakan Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu RF mengenai Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai, penulis menanyakan perihal program-program pengentasan dan bantuan sosial bagi masyarakat Danau Tundai. Berikut penuturan beliau:

“Kalau program penanganan kemiskinan di danau tundai, dari dinsos ada Rastra (Beras Sejahtera) atau yang biasa dikenal dengan Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin), kemudian PKH atau Program Keluarga Harapan yang dulunya dikenal dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu per 3 bulan sekali ditransfer dari kemensos langsung ke rekening penerima PKH itu tadi. Kemudian juga ada KUBE (Kelompok Usaha Bersama), tapi untuk danau tundai sendiri tidak mendapatkan bantuan KUBE. Tapi kelurahan Tanjung Pinang tetangganya Danau Tundai dapat, sudah 4 tahun ini tanjung pinang jadi binaan dinsos kota”⁷⁹

Kemudian penulis menanyakan perihal tidak terdaftarnya Kelurahan Danau Tundai sebagai penerima bantuan KUBE, beliau menjelaskan bahwa:

“Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran transportasi. Untuk menuju danau tundai kita harus melalui 2 kali perjalanan, darat dan menyeberangi sungai. Biaya kapal kelotok kesananya juga tidak murah”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu RF, jauh serta sulitnya akses transportasi dan terbatasnya anggaran

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu RF pada 11 September 2017

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu RF pada 11 September 2017

transportasi menuju Kelurahan Danau Tundai menjadi penyebab tidak sampainya bantuan KUBE ke Danau Tundai.

d. Narasumber Keempat

Berikut adalah identitas narasumber keempat yang penulis wawancara:

Nama : SW

Pekerjaan/Jabatan : Nelayan/Warga Danau Tundai

Narasumber keempat adalah Bapak SW yang merupakan Nelayan/Warga Danau Tundai. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak SW mengenai Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan serta dampak dan manfaat yang dirasakan di Kelurahan Danau Tundai, penulis menanyakan perihal program-program pengentasan dan bantuan sosial bagi masyarakat Danau Tundai. Berikut penuturan beliau:

“BKM ini bagus. Sangat membantu. Dulu sebelum ada jembatan kalo mau kemana-mana (rumah tetangga) kami bejukung. Trus kami buat jembatan, tapi rendah. Biasanya kalo musim banyu dalam (air pasang) jembatan (titian jalan) nya tenggelam. Susah kami ngira-ngira jalannya. Sekarang udah tinggi. Jadi enak, gak takut nyebur lagi. Kalo raskin juga sangat membantu, biasanya kalo beli dipasar harga beras sekilo nya Rp. 11.000,- tapi kalo dapat raskin jauh lebih murah. Jadi tiap hari bisa makan nasi lah”⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Bapak SW pada 20 Agustus 2017

e. Narasumber Kelima

Berikut adalah identitas narasumber kelima yang penulis wawancara:

Nama : RN

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga/Warga Danau Tundai

Narasumber keempat adalah Ibu RN yang merupakan Ibu Rumah Tangga/Warga Danau Tundai. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu RN mengenai Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan serta dampak dan manfaat yang dirasakan di Kelurahan Danau Tundai, penulis menanyakan perihal program-program pengentasan dan bantuan sosial bagi masyarakat Danau Tundai. Berikut penuturan beliau:

“Alhamdulillah banget ada bantuan raskin, bisa lebih hemat uang. Jadi uangnya bisa buat beli sayur mayur sama bumbu lainnya. Bisa ngasih uang jajan buat anak ku yang sekolah juga. Trus sekarang juga ada PAUD, sangat membantu sekali. Anak ku yang halus umur 3 tahun sudah pintar mengenal ABC”.⁸²

H. Analisis Data

Pada bab ini penulis membahas tentang Upaya dan Peran Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

⁸² Wawancara dengan Bapak Ibu RN pada 20 Agustus 2017

1. Upaya dan Peran Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai

Pemerintah, sebagai lembaga tertinggi negara memegang peran penting dalam penanganan kemiskinan di negaranya. Sebagai lembaga tertinggi, pemerintah dituntut semaksimal mungkin dalam menentukan kebijakan yang pro-rakyat dan tepat dalam upaya memangkas angka kemiskinan. Agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, pemerintah harus memenuhi aspek-aspek peran itu sendiri. Selain itu pemerintah juga harus berperan secara normatif, ideal, dan faktual.

Seperti yang telah diketahui berdasarkan wawancara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (yaitu Lurah Danau Tundai, Kasi Kesos Kecamatan Sebangau, dan Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palangka Raya) bahwasanya program penanganan kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai ialah Kota-ku atau BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin) atau Rastra (Beras Sejahtera), dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dulu dikenal dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Program Kota-ku atau BKM adalah program pemerintah berupa pembangunan fasilitas fisik/publik desa/kelurahan. Tujuan utama program ini adalah untuk memimpin masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih terorganisir, terarah dan berkelanjutan. Anggota Kota-Ku terdiri dari pribadi-pribadi yang

dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama yang dipilih melalui suatu mekanisme pemilihan anggota Kota-Ku, dimana proses pemilihannya tanpa kampanye dan tanpa pencalonan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak F.A sebagai Lurah Danau Tundai:

“...kota-ku ini masyarakat memilih program-program yang dibutuhkan mereka seperti fisik, pembangunan-pembangunan yang di danai oleh pemerintah pusat. Dari Kota-Ku itu masyarakat memilih sendiri koordinator dan basecampnya ada di bappeda. Masyarakat memilih anggota kepengurusan sendiri, keuangan pun langsung kepada masyarakat. Program mereka dinahkodai oleh kelurahan dan yang berkepentingan adalah lurah. Tahun lalu, tahun 2016 jembatan titian jalan itu sudah. Dan tahun 2017 ini akan kami bangun PAUD dan titian menuju ke danau tundai.”

Program Kota-ku ini berjalan dengan sangat baik, terbukti dengan dibangunnya beberapa fasilitas publik bagi masyarakat Kelurahan Danau Tundai demi memudahkan kegiatan sosial dan ekonomi mereka. Dengan program Kota-ku ini maka negara telah memenuhi kewajibannya untuk mendorong keluarga dan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan.

Melalui program Kota-ku juga pemerintah telah melakukan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis, diharapkan mereka dapat lebih mandiri

dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Selain program yang bersifat memberdayakan juga ada program pemberian bantuan sosial yaitu Raskin/Rastra dan BLT/PKH. Tujuan dari pemberian bantuan raskin adalah:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- 2) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 4) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.⁸³

Sedangkan tujuan dari program BLT adalah memberikan kompensasi atas kenaikan bahan kebutuhan pokok sehingga mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat. Melalui program tersebut maka negara telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang beresiko akibat kebijakan negara.

Meskipun bantuan sosial berupa Raskin/Rastra dan BLT/PKH dinilai sangat membantu keberlangsungan hidup masyarakat miskin, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesalahan sasaran (*mistargetting*) dalam menentukan jumlah penerimanya. Hasil penelitian

⁸³ Nasrul Hidayat, www.claustra-phobia.blogspot.co.id/p/blog-page.html?m=1, diakses pada Rabu, 18 Oktober 2017 Pukul 15:14 WIB.

dilapangan menunjukkan bahwa seluruh KK di Kelurahan Danau Tudai menjadi penerima Raskin.

**Tabel 4.4 Jumlah KK Penerima Raskin
Kecamatan Sebangau Tahun 2017**

NO	KELURAHAN	KPM	KG
1.	Kameloh Baru	130	11.700
2.	Bereng Bengkel	149	13.410
3.	Kalampangan	159	14.310
4.	Kereng Bangkirai	174	15.660
5.	Danau Tundai	65	5.850
6.	Sabaru	55	4.950
JUMLAH		732 KK	65.880

Sumber: Arsip Kesos Kecamatan Sebangau

Jumlah penerima raskin kelurahan Danau Tundai sebanyak 65 KK tersebut menaiki kenaikan setiap tahunnya. Berikut data yang penulis peroleh dari penelitian di lapangan.

**Tabel 5.4 Jumlah KK Penerima Raskin
di Kelurahan Danau Tundai Periode 2015-2017**

NO	TAHUN	KK
1.	2015	54

2.	2016	58
3.	2017	65

Sumber: Arsip Kelurahan Danau Tundai

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penerima Raskin/Rastra di Kelurahan Danau Tundai mengalami kenaikan. Sedangkan dari hasil penelitian penulis dilapangan, didapati bahwa jumlah KK miskin bukanlah berjumlah 65 KK. Penulis menggunakan metode 14 Kriteria RTM (Rumah Tangga Miskin) versi BPS dan metode pendekatan pengeluaran. Cara mengukur RTM tersebut berdasarkan besaran garis kemiskinan (GK) pada Maret 2017 sebesar Rp. 374.500 per kapita per bulan. Jika suatu rumah tangga memiliki tiga anak ditambah mertua, jumlah anggota rumah tangga tujuh orang, artinya garis batas rumah tangga tersebut dikatakan miskin jika pengeluaran per bulan kurang dari Rp. 2,6 juta. Angka ini bervariasi, tergantung pada jumlah anggota rumah tangga sebagai penimbangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 61 KK RTM (Rumah Tangga Miskin), sedangkan sisanya sebanyak 4 KK adalah tergolong dalam kategori hampir miskin.⁸⁴

Lembaga pemerintah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya dalam perihal penentuan RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebagai penerima Raskin agar tidak terjadi salah sasaran. Hal ini akan menjadi masalah jika terjadi penambahan jumlah kemiskinan di daerah lainnya, maka akan meningkatkan juga permintaan pada BULOG dan menambah anggaran

⁸⁴ Observasi penulis pada 03 November 2017

belanja negara. Selain itu, peristiwa salah sasaran ini juga sangat bertentangan dengan pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bantuan sosial berupa Raskin/Rastra dan BLT/PKH tersebut bersifat konsumtif. Hendaknya pemerintah lebih memperbanyak program berupa pemberdayaan masyarakat agar masyarakat Kelurahan Danau Tudai mampu meningkatkan tingkat produktifitas dan kinerjanya. Masyarakat Danau Tundai yang mayoritas nelayan bekerja hanya sekitar 4-5 jam sehari. Mereka memasang alat tangkap ikan di malam atau dini hari, kemudian mengangkat jaring atau alat tangkap lainnya pada pagi hari. Sisa waktu luang disiang hari hanya digunakan untuk tidur, beristirahat atau sekedar santai. Tidak dapat mengerjakan apa pun bukan berarti mereka tidak mau, akan tetapi karena terbatasnya skill dan wawasan yang mereka miliki. Disinilah peran pemerintah melalui program pemberdayaan sangat diperlukan. Sayang sekali, program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti KUBE tidak sampai kepada masyarakat Danau Tundai seperti pernyataan Ibu RF berikut ini.

“...kemudian juga ada KUBE (Kelompok Usaha Bersama), tapi untuk danau tundai sendiri tidak mendapatkan bantuan KUBE. Tapi kelurahan Tanjung Pinang tetangganya Danau Tundai dapat, sudah 4 tahun ini tanjung pinang jadi binaan dinsos kota”

Seharusnya, jauhnya lokasi dan terbatasnya anggaran transportasi bukanlah menjadi alasan untuk tidak menyamaratakan program KUBE tersebut. Terlebih lagi Danau Tundai memiliki potensi yang besar untuk diberdayakan. Jika menyoal transportasi, kantor kelurahan Danau Tundai

memiliki kelotok (kapal) operasional yang boleh digunakan untuk keperluan desa. Seharusnya, dinas sosial berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mencanangkan program tersebut. Dengan demikian, diharapkan agar komunikasi antar lembaga pemerintah lainnya dan SKPD perlu untuk diperbaiki demi tercapainya tujuan program-program penanganan kemiskinan tersebut.

2. Upaya dan Peran Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Merupakan fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi. Sebab keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian yang mustahil bisa dipisahkan darinya.

Dalam Islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan bertawakal kepada Allah SWT. Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar kepada bantuan orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan. Allah SWT sangat menghargai orang yang berusaha karena seorang yang berusaha berarti ia telah menunaikan kewajiban.

Program Kota-Ku/BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pendidikan dan

pemberdayaan. Pelaksanaan sosialisasi, pemetaan swadaya, pelatihan dan pembinaan termasuk dalam konteks sosial ekonomi Islam. Anjuran tolong menolong dalam kebijakan dan ketakwaan, di mana dalam Al-Qur'an di jelaskan tentang kewajiban kepada manusia untuk saling tolong-menolong atas setiap usaha yang bermanfaat bagi manusia baik secara individual atau kelompok, bermanfaat untuk urusan agama atau urusan dunia sekaligus bahu-membahu menolak segala hal yang dapat merusak dan membahayakan bagi kehidupan bersama. Allah menegaskan dalam Q.S. Al- Maidah ayat 2:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah :2)

Melalui ayat ini Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketaqwaan, sebaliknya Allah SWT melarang umatnya untuk saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa. Termasuk dalam Program Kota-Ku/BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), di dalam program ini masyarakat mendapatkan bantuan dana dalam bentuk perbaikan desa

yang lebih baik dan memberikan bantuan modal dalam menjalankan usahanya, terbukti Program Kota-Ku/BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kelurahan Danau Tundai menjalankan amanah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan sesuai dengan anjuran Islam.

Program sarana dan prasarana di Kelurahan Danau Tundai yang didanai oleh Program Kota-Ku/BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sudah di jalankan sesuai dengan Teknik Oprasional Kegiatan, dimana dalam perencanaan program melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak untuk bersama-sama dalam menentukan pembangunan sarana dan prasarana yang sangat berguna untuk mereka.

Agar agama Islam tidak dinilai gagal dalam mengemban misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, maka boleh jadi orang akan menjauhi bahkan akan meninggalkan ajaran agama yang diyakininya selama ini.

Program Subsidi Beras (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal mauun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan

program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Mekanisme pembagian Raskin di Kelurahan Danau Tundai dilakukan dengan dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Kelurahan Danau Tundai. Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.

Surat Al-Hashr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hashr : 7).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendistribusian beras subsidi Raskin adalah proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman beras dari pemerintah melalui perum bulog kepada masyarakat secara keseluruhan.

Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Berdasarkan argumen-argumen di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat

yang miskin. Berarti begitu juga dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk menganalisis pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Kelurahan Danau Tundai, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu:

a. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara" termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktek pendistribusian beras Raskin di Kelurahan Danau Tundai dengan sistem bagi rata telah terjadi pengambilan harta dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengambil harta yang seharusnya menjadi hak orang miskin. Karena meskipun masyarakat desa menerima beras Raskin melalui cara yang sah yaitu jual beli, namun pada dasarnya dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur

kerelaan dari masyarakat miskin. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak sesuai dalam Sistem Ekonomi Islam.

b. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Ad-Dhuryat:19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia

memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Kelurahan Danau Tundai yang tidak miskin termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

c. Keadilan dalam Distribusi

Dalam kamus besar bahasa indonesia keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata '*adala*, yang dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Kata '*adl* di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl* (keadilan).

Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah.

Dengan demikian, dalam persoalan distribusi bagi rata beras Raskin di Kelurahan Danau Tundai tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Raskin secara merata terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

Untuk menganalisis mengentaskan kemiskinan, penulis hendak menganalisisnya dengan konsep Islam dalam menghapus kemiskinan yaitu:

a. Motivasi Bekerja dan Pemberdayaan

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَّرْقَةِ وَالْيَهُ النَّشُورُ ١٥

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah

sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(al-Mulk: 15)

Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.

Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Hal itu akan terwujud apabila sistem Islam yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dilaksanakan secara konsisten.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam kenyataannya pemerintah hanya memberi kebutuhan yang membuat masyarakat selalu berharap adanya bantuan.

Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Seharusnya, pemerintah memberikan bantuan yang bersifat memancing minat masyarakat untuk mau bekerja dan berproduksi, seperti KUBE. Akan tetapi, terbatasnya anggaran dan susahny akses menuju lokasi menjadi alasan pemerintah kota untuk tidak membagi jatah

KUBE ke Kelurahan Danau Tundai. Padahal, daerah terisolasi seperti Kelurahan Danau Tundai seharusnya menjadi perhatian juga untuk pemerintah kota.

Masyarakat Danau Tundai sangat berpotensi untuk diberdayakan. Waktu luang yang mereka miliki setelah mencari ikan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Akan tetapi, keterbatasan wawasan dan skill menjadikan masyarakat Danau Tundai tidak memiliki kreativitas dan semangat peningkatan taraf kehidupannya.

Selain dengan bekerja, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan masyarakat Danau Tundai hendaknya memperhatikan pola konsumsi, terutama konsumsi bukan makanan. Hampir seluruh pria dewasa berusia produktif di Danau Tundai adalah perokok aktif. Dengan mengurangi, atau bahkan menghentikan konsumsi rokok akan mengurangi pengeluaran dan bisa melakukan *saving money* (menabung). Jika dikalkulasi pengeluaran untuk membeli rokok seharinya Rp. 15.000,- per bungkus dikalikan dengan 30 bungkus per bulan, mereka bisa menghemat pengeluaran atau menabung sebanyak Rp. 450.000,- per bulan nya.

Islam menganjurkan umatnya untuk tidak boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Sesuai dengan prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan

hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*) .Hal ini telah disebutkan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27.

b. Jaminan Sosial (takaful)

Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antaranggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antar family dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturrahim yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental. Inilah hakikat kejadian yang didukung oleh hakikat syariat.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, bahwa jaminan sosial adalah suatu keharusan diantara keharusan-keharusan persaudaraan, bahkan suatu yang paling utama, yaitu perasaan tanggung jawab dari yang satu terhadap yang lain, dimana setiap orang turut memikul beban saudaranya, dan dipikul bebannya oleh saudaranya, dan selanjutnya ia harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan bertanggung jawab terhadap saudaranya.

Jaminan sosial (*takaful*) bisa dilakukan dengan meningkatkan solidaritas sosial antar warga Danau Tundai. Saling tolong menolong apabila salah satu warga kesusahan, misalnya tidak punya cukup bahan makanan untuk sehari maka warga atau tetangga dekat wajib memberikan bantuan semampunya.

c. Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Islam tidak pernah melupakan mereka. Allah SWT telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.

Menurut Lurah Danau Tundai, bantuan berupa zakat (sembako) sering masuk ke Danau Tundai. Tidak hanya pada bulan Ramadhan, bantuan berupa sembako juga kerap kali datang ketika musim pilkada.

Seharusnya, lembaga zakat seperti Baznas Kota Palangka Raya lebih memperluas lagi jangkauan penerima zakat (*mustahiq*). Bukan hanya di daerah yg mudah dijangkau seperti dalam kota, tetapi juga daerah pinggiran kota yang bahkan hampir terisolasi seperti Kelurahan Danau Tundai karena sulitnya akses transportasi. Zakat yang diberikan pun tidak harus selalu tentang zakat yang bersifat konsumtif, akan tetapi zakat yang bersifat produktif di bidang

pendidikan seperti program zakat “Satu Keluarga Satu Sarjana” untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Danau Tundai agar mampu memajukan daerah/kelurahannya sehingga mampu memangkas angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Danau Tundai sendiri.

Bukan hanya zakat untuk pendidikan, tapi juga zakat harta yang bersifat produktif untuk masyarakat dalam usia produktif. Zakat produktif ini sangat disarankan untuk disalurkan kepada masyarakat Danau Tundai. Dengan zakat produktif, masyarakat akan lebih banyak berproduksi, bekerja, dan berusaha demi meningkatkan taraf kehidupannya dan keluarganya sesuai dengan tujuan produksi dan distribusi dalam ekonomi Islam.

d. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran.

Seharusnya, pemerintah kota Palangka Raya lebih tegas lagi dalam membuat kebijakan untuk Lembaga terkait penanganan fakir miskin. Pemko khususnya walikota Palangka Raya hendaknya

memantau langsung atau 'blusukan' untuk melihat kinerja SKPD, Dinsos maupun Lembaga lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengentasan kemiskinan mengingat kinerja para pelaksana inilah yang akan menentukan keberhasilan dari suatu program yang dijalankan. Bukan hanya memantau, dengan turun langsung kelapangan maka walikota akan melihat langsung kondisi kemiskinan dan mencari solusi yang sangat relevan untuk diterapkan dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Penulis berharap agar Pemko lebih tegas dan mengawasi kinerja SKPD maupun PNS yang bertugas di Kelurahan Danau Tundai. Jadwal berkunjung yang hanya 3 hari sekali sangat melanggar aturan ketentuan jam kerja yang seharusnya. Para wakil masyarakat seharusnya lebih pro rakyat dengan mendahulukan kepentingan orang masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi.

Kemudian, kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat jika hanya diberi bantuan Beras Subsidi (Raskin) dan bantuan seperti BLT. Pemko hendaknya membuat proyek percontohan penanganan masyarakat miskin nelayan melalui pelatihan kerja dan pemberdayaan. Misalnya memberdayakan masyarakat miskin Danau Tundai dengan pembudidayaan ikan seperti ikan pati, nila, ikan mas, dan lain-lain yang sudah menjadi lauk kegemaran masyarakat khususnya Kalimantan. Jam kerja masyarakat nelayan Danau Tundai

yang hanya 3-4 jam sehari seharusnya menjadi peluang untuk lebih menggalakkan pemberdayaan. Banyaknya waktu luang dan kurangnya tingkat produktifitas nelayan Danau Tundai bukan dikarenakan mereka malas, akan tetapi karena keterbatasan skill dan wawasan yang dimiliki. Disinilah peran serta kebijakan pemerintah yang pro-masyarakat miskin pinggiran sangat diperlukan. Apabila program pemberdayaan tersebut berhasil, maka bisa diterapkan kepada masyarakat dan pemukiman nelayan lainnya guna meningkatkan produktifitas nelayan dan mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian diharapkan masyarakat tersebut kedepannya bisa menjadi muzakki, bukan hanya menjadi mustahiq secara terus menerus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan yang telah ditulis sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan dengan pandangan sebagai berikut:

1. Upaya dan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai diantaranya adalah melalui program Kota-Ku/BKM, Raskin/Rastra, dan BLT/PKH.
2. Program Kota-Ku/ BKM yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan perspektif ekonomi Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (*maslahah*). Sedangkan pendistribusian Raskin/Rastra di Kelurahan Danau Tundai adalah tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dengan Prinsip Keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin/Rastra tersebut tidak mencerminkan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Danau Tundai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Tinjauan Ekonomi Islam, penulis mencoba

memberi saran tanpa bermaksud untuk menyinggung atau menggurui siapapun:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Palangka Raya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terbatas sulitnya akses dan jauhnya jarak yang ditempuh sehingga masyarakat mendapat hak mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintahan harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam segala hal, karena masyarakat butuh kenyamanan dalam setiap urusan-urusan yang ada.
2. Karena sulitnya menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) setidaknya aparat desa bersikap bijaksana dan membagikan Raskin/Rastra yaitu kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Apabila yang menerima Raskin/Rastra memang masyarakat dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat mungkin dapat mengerti/menerimanya sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial.
3. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menumbuh kembangkan penerapan Sistem Ekonomi Islam di Kota Palangka Raya guna menghindari salahnya arah bantuan yang semula diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan yang sangat membutuhkan.
4. Seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga bantuan yang bersifat produktif melalui

pemberdayaan masyarakat. Bantuan di bidang pendidikan juga sangat penting. Diharapkan pemerintah kota lebih memperhatikan pendidikan masyarakat pinggiran dengan lebih banyak lagi memberikan bantuan berupa beasiswa hingga lulus Sekolah Menengah Atas, bahkan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosda
Karya, 2005.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta :
Jalasutra, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Reneka Cipta,
1993.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam :
Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2008.
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi
Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT.
Karya Toha Putra, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012.

- Hasan, Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Machendrawaty, Nanih, dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 200.
- Metwally, M.M, *A Behavioural Model of An Islamic Firm," Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif*, Longman Malaysia 1992.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Muhammad bin Sa'id bin Naji Al-Ghamidi, *Ushul Al- Iqtishad Al-Islami*,
- Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin, *et. al*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII
Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2009.
- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi
Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj.,
Syafri Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta
: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani
Press. 1997.
- Qodratilah, Meity Taqdir, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*,
Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld 1. Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf. 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Ridwan, Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press,
2011.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Said, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press,
2008.

Salam, Syamsir dan Amir Fadhilah, *Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral*, Jakarta; lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet. 6*, Bandung: Alfabet, 2010.

Suharto ,Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosia: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Wargadinata, Wildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Westra, Pariata, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

Yin, Robert K., *Studi Kasus Desain dan Metode, Ter. M. Faudzi Mudzakir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

B. SKRIPSI

Rengapратиwi, Amelia, *Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan*, 2009.

C. JURNAL, ARTIKEL, DAN UNDANG-UNDANG

Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota* 2016.

Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober* 2017.

Budiani, Ni Wayan, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, UNUD: Denpasar, 2007.

Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, Kata Pengantar, h. iv

Sudaryanto, Gatot, *Studi Tentang Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Puger Kabupaten Jember*, 2010.

Taufiq, Ahmad, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal* 2008.

UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 1.

D. INTERNET

Amduk Kalteng, *Upaya Pengentasan Kemiskinan*, diambil dari:
<http://amdukkalteng.blogspot.co.id/2016/07/penelitian-upaya-pengentasan-kemiskinan.html>, diakses pada 01 Maret 2017 pukul 17:11 WIB.

Ashe Satria, *Definisi Pemberdayaan*, diambil dari:
<http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaan.html>, diakses pada Selasa 04 April 2017 pukul 17:40 WIB.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/index.php/publikasi>, diakses pada Rabu, 01 November 2017 pukul 21:07 WIB.

Wikipedia, *Studi Kasus*, diambil dari:
http://id.m.wikipedia.org/wiki/studi_kasus, diakses pada Rabu, 01 Maret 2017 pukul 17:03 WIB.

Wikipedia, *Pengertian Tawas*, diambil dari:
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tawas>, diakses pada Selasa, 07 November 2017 pukul 18:58 WIB).

Muchtar Unisma, *Pemerintah dalam Ekonomi Islam*, diambil dari:
<http://almuslimunfoundation.blogspot.co.id/2014/04/pemerintah-dalam-ekonomi-islam.html?m=1>, diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 13:37 WIB.

Nasrul Hidayat, www.claustrophobia.blogspot.co.id/p/blog-page.html?m=1, diakses pada Rabu, 18 Oktober 2017 Pukul 15:14 WIB.

Parhan Taufik, *Pengertian dan Tujuan BKM*, diambil dari:
www.bkmsdl.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-dan-tujuan-bkm.html?m=1, diakses pada Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 15:06 WIB.

Rahman Elharawy, *Peran Negara dalam Perspektif Ekonomi*, diambil dari:

rahman.elharawy.web.id/2011/12/peran-negara-dalam-perspektif-ekonomi.html?m=1, diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 13:15 WIB.

Ahmad Dhuha, *Danau Tundai The Black Water*, diambil dari:

www.kelurahanda.blogspot.co.id/?m=1, diakses pada hari Rabu 13 September 2017 pukul 14:15 WIB